Setujui Raperda Non APBD dan Rekom Komisi terhadap LKPJ Bupati

Selasa, 2 Mei 2017

DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Paripurna yang membahas dua agenda sekaligus, yaitu persetujuan Raperda Non APBD tahun 2017 dan penyampaian Rekomendasi Komisi terhadap Laporan Khusus Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun 2016. Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, dan dihadiri oleh anggota DPRD, Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, Wakil Bupati, Riang Kulup Prayudha, dan pejabat Pemkab Pasuruan.

Meskipun laporan pansus dan rekomendasi komisi disetujui, sidang paripurna diwarnai dengan interupsi dari beberapa anggota dewan. Salah satu anggota dewan, Rohani Siswanto, memilih walkout sebagai bentuk kekecewaannya atas pembahasan LKPj dan raperda di internal komisi. Rohani merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan rekomendasi komisi terkait LKPj dan keberatan atas penyerahan rekomendasi atas raperda oleh pansus tanpa dibacakan di muka umum paripurna.

Rohani menyatakan bahwa walkout yang dilakukannya merupakan keputusan pribadi dan bukan atas nama fraksi. Sidang paripurna kemudian dilanjutkan dan menyepakati pengesahan LKPj 2016 dan empat raperda secara borongan. Keempat raperda tersebut meliputi perubahan nomor 6 tahun 2015 tentang desa, ketertiban dan ketentraman umum, raperda bangunan gedung, dan raperda pemberantasan, pencegahan dan penanggulangan prostitusi di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Insiden walkout tersebut menjadi sorotan dalam sidang paripurna, menunjukkan adanya perbedaan pendapat dan kekecewaan anggota dewan terhadap proses pembahasan LKPj dan raperda. Meskipun demikian, sidang paripurna tetap dilanjutkan dan menghasilkan keputusan untuk mengesahkan LKPj 2016 dan empat raperda.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.